

## FUNGSI SOSIALISASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIH PEMULA DI KOTA PONTIANAK

**Muhammad Anwar Rube'i<sup>1</sup>, Idham Azwar<sup>2</sup>, Syarif Firmansyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIPPS IKIP PGRI Pontianak  
Jl. Ampera No 88 Pontianak, Telp. (0561) 748219 / 6589855  
e-mail: [anwarptk87@gmail.com](mailto:anwarptk87@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik untuk pemilih pemula di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk studi deskriptif. alat pengumpul datanya adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, display/penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. dalam menjamin keabsahan data peneliti melakukan cross check melalui informasi data wawancara pada subjek penelitian dan dokumentasi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik bagi pemilih pemula adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan salah satu agen sosialisasi politik dengan memberikan pendidikan politik bagi pemilih, memaksimalkan proses sosialisasi, melakukan survey atau jejak pendapat, dan meningkatkan kinerja pemilu. Faktor-Faktor yang mempengaruhi KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik adalah mekanisme sosialisasi politik, Pola sosialisasi politik, faktor sosial ekonomi dan sistem politik.

**Kata Kunci:** Komisi Pemilihan Umum, Sosialisasi Politik, Pemilih Pemula

### Abstract

*This study aims to find out the role of the General Election Commission (KPU) in carrying out the political outreach function for first-time voters in Pontianak City. This research uses a qualitative approach with a descriptive study form. with the data collection tools being observation guides, interview guides, and documentation. techniques in analyzing the data in this study by means of data reduction, display/presentation of data, and drawing conclusions. In ensuring the validity of the data, the researcher cross-checked through information on interview data on research subjects and the documentation obtained. The results of the study show that the role of the General Election Commission in carrying out the political outreach function for first-time voters is as an election management body and one of the agents of political socialization by providing political education for voters, maximizing the outreach process, conducting surveys or opinion polls, and improving election performance. The factors that influence the KPU in carrying out political socialization are the mechanism of political socialization, the pattern of political socialization, socio-economic factors and the political system.*

**Keywords:** General Election Commission, Political Socialization, Beginner Voters

## PENDAHULUAN

Pemilih pemula adalah kelompok pemilih yang baru pertama kali berpartisipasi dalam proses pemilihan umum atau memiliki pengalaman yang terbatas dalam memilih. Mereka biasanya merupakan warga negara yang baru mencapai usia pemilih atau baru terlibat aktif dalam urusan politik. Berikut ini adalah esai tentang pemilih pemula. Pemilih pemula memainkan peran penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebagai kelompok yang relatif baru dalam hal pemilihan, pemilih pemula seringkali memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang politik dan proses pemilihan. Namun, penting untuk memberikan perhatian khusus pada mereka, karena mereka adalah generasi masa depan yang akan mempengaruhi arah perubahan politik dan pembangunan negara.

Pemilih pemula adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu yang pertama kali berpartisipasi dalam pemilihan umum. Mereka adalah pemilih yang baru saja mencapai usia yang memenuhi syarat untuk memilih atau yang sebelumnya tidak tertarik atau tidak memenuhi syarat untuk memilih. Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum memiliki arti penting, karena dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan menunjukkan kesadaran politik serta keinginan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi (Lukman Janji, 2013:1)

Pemilih pemula memiliki potensi besar dalam membentuk peta politik dan keputusan nasional. Namun, mereka juga rentan terhadap pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi pilihan politik mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan sosialisasi politik yang tepat kepada pemilih pemula agar mereka dapat memahami pentingnya partisipasi politik, hak suara, serta dampak dari keputusan mereka dalam pemilihan.

Untuk mencapai hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang krusial dalam memberikan edukasi dan sosialisasi politik kepada pemilih pemula. KPU harus memastikan bahwa informasi mengenai proses pemilihan, calon pemimpin, partai politik, dan program kerja disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Kegiatan pelatihan, debat publik, serta kampanye yang melibatkan pemilih pemula perlu diselenggarakan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam mendapatkan informasi dan mengajukan pertanyaan kepada calon pemimpin.

Selain itu, pemilihan umum dan politik harus disosialisasikan di lingkungan pendidikan, seperti sekolah dan kampus. Melalui kurikulum yang relevan dan kegiatan ekstrakurikuler, pemilih pemula dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem demokrasi, nilai-nilai politik, dan etika partisipasi politik yang bertanggung jawab.

Media sosial dan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mencapai pemilih pemula yang lebih luas. KPU harus menghadirkan informasi dan materi sosialisasi politik melalui platform digital yang populer di kalangan pemilih pemula. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah mengakses informasi, bertukar pendapat, dan berpartisipasi dalam diskusi politik yang membangun.

Penting juga untuk memberikan perhatian pada isu-isu yang relevan bagi pemilih pemula, seperti pendidikan, lingkungan, dan lapangan kerja. Membahas isu-isu ini secara komprehensif dan menyeluruh dapat membangkitkan minat dan partisipasi pemilih pemula, serta memberikan mereka pemahaman tentang dampak politik dalam bidang-bidang tersebut. Untuk itu perlu adanya upaya untuk mensosialisasikan mengenai hal tersebut diatas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik bagi pemilih pemula. Pemilih pemula adalah mereka yang baru berusia

memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan. Berikut adalah peran KPU dalam sosialisasi politik untuk pemilih pemula: Pertama Pendidikan Politik: KPU bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Mereka dapat mengadakan program-program pendidikan politik seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan. Melalui pendidikan politik ini, pemilih pemula dapat memahami pentingnya partisipasi politik dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. kedua. Informasi Pemilu: KPU bertugas menyampaikan informasi yang jelas dan akurat tentang proses pemilu kepada pemilih pemula. Mereka harus memberikan penjelasan mengenai tahapan pemilu, pemilih yang berhak memberikan suara, syarat-syarat pencalonan, dan berbagai aspek lain yang terkait dengan pemilihan umum. Informasi yang transparan dan mudah dipahami akan membantu pemilih pemula dalam mengambil keputusan yang tepat. Ketiga Kampanye Pendidikan Pemilu: KPU juga dapat mengadakan kampanye pendidikan pemilu yang ditujukan khusus untuk pemilih pemula. Kampanye ini dapat berupa penggunaan media sosial, iklan, brosur, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilih pemula tentang pentingnya ikut serta dalam pemilihan. Keempat Pembentukan Pemilih Aktif: KPU perlu mendorong pemilih pemula agar aktif dalam proses politik. Mereka dapat mengadakan program-program yang mendorong partisipasi seperti debat kandidat, diskusi publik, dan acara interaktif lainnya. Dengan demikian, pemilih pemula dapat memahami peran mereka dalam memilih calon yang mewakili kepentingan mereka dan berkontribusi pada perkembangan demokrasi negara. Kelima Pengawasan dan Penegakan Hukum: KPU juga harus memastikan bahwa pemilihan berjalan secara adil dan jujur. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan menegakkan hukum terkait pelanggaran yang terjadi. Melalui tindakan ini, KPU dapat membangun kepercayaan pemilih pemula terhadap proses pemilihan dan menjaga integritas demokrasi.

Dengan melaksanakan peran-peran tersebut, KPU dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik pemilih pemula. Dengan memastikan pemilih pemula memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses pemilihan, hak-hak mereka, dan pentingnya partisipasi politik, KPU dapat membantu menciptakan generasi pemilih yang sadar dan bertanggung jawab dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota bertugas mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas/ wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat”.

Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berisikan peraturan hukum yang mengatur tata cara dan proses pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari persiapan pemilu hingga penyelesaian sengketa pemilihan.

Undang-undang Pemilu mencakup berbagai aspek, seperti penetapan daftar pemilih, pemilihan calon, kampanye politik, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa. Undang-undang ini juga mengatur mengenai partisipasi partai politik, pengawasan pemilu, dan penggunaan dana kampanye.

Selain itu, undang-undang Pemilu juga mengatur berbagai persyaratan bagi calon pemilih, seperti batasan usia, kewarganegaraan, dan pencatatan dalam daftar pemilih. undang-undang ini juga menetapkan mekanisme pembentukan lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan melaksanakan pemilihan umum.

Undang-undang Pemilu secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, transparan, dan adil. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta mengatur sanksi bagi pelanggaran aturan yang terkait dengan pemilihan umum.

Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum, termasuk peserta pemilihan, partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, dan masyarakat umum, untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Pemilu guna menjaga integritas dan keabsahan pemilihan serta mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

Pada undang-undang tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik berupa sosialisasi politik pada masyarakat termasuk pemilih pemula. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk meneliti “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula Di Kota Pontianak”.

## **METODE PENELITIAN**

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti dikantor KPU Kota Pontianak yang berada di Jalan Johar No 1 A. Metode penelitian yang digunakan disini adalah penelitian kualitatif, dengan tujuan mendapatkan gambaran secara jelas tentang bagaimana “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Pontianak”.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif.

Bentuk penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, atau fenomena dari peristiwa yang terjadi. Hal ini disebabkan peneliti menganalisis tentang bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kota Pontianak. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Sekretaris KPU, Anggota KPU, Siswa dan Mahasiswa. Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, dan teknik studi dokumenter dengan alat pengumpul datanya adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan tahap pengumpulan data, reduksi data dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki peran penting dalam menjaga dan melaksanakan pemilihan umum yang adil, demokratis, dan transparan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan undang-undang Pemilihan Umum dan bertugas mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemilihan umum di semua tingkatan, mulai dari pemilihan presiden, legislatif, daerah, hingga pemilihan kepala daerah.

Tugas utama KPU adalah merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan pemilihan umum. Mereka bertanggung jawab dalam menyusun jadwal pemilihan, menetapkan daftar pemilih, mengatur pemilihan calon, serta memastikan kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. KPU juga memiliki peran dalam menjaga netralitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, KPU juga memiliki tugas sebagai pengawas pemilu. Mereka memiliki kewenangan untuk mengawasi segala aktivitas terkait dengan pemilihan umum, mulai dari kampanye politik, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. KPU berupaya mencegah dan menanggulangi pelanggaran yang mungkin terjadi selama pemilihan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

KPU juga berfungsi sebagai pengatur pemilu. Mereka mengeluarkan peraturan dan pedoman terkait pelaksanaan pemilihan umum. KPU menetapkan aturan mengenai partisipasi partai politik, dana kampanye, pemanfaatan media massa, serta prosedur penyelesaian sengketa pemilihan. Dengan peraturan yang jelas, KPU berupaya menjaga kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan dalam pemilihan umum.

Sebagai lembaga yang independen, KPU berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemilu

yang bebas dari intervensi politik dan pengaruh kekuatan tertentu. KPU juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik melalui penyelenggaraan pemilihan yang adil dan demokratis.

Dalam kesimpulan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemilihan umum yang adil, demokratis, dan transparan. Lembaga ini berperan dalam memastikan netralitas, profesionalisme, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melaksanakan pemilihan umum yang adil, demokratis, dan transparan di Indonesia. Oleh karenanya KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam menjalankan tugas-tugas pemilihan umum di Indonesia. Fungsi KPU tidak hanya sebatas sebagai penyelenggara pemilihan, tetapi juga sebagai pengawas dan pengatur jalannya proses pemilu. Fungsi-fungsi ini memberikan kontribusi besar dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Fungsi pertama KPU adalah sebagai penyelenggara pemilihan. KPU bertanggung jawab dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan pemilihan umum dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Mereka bertugas menyusun jadwal pemilihan, menetapkan daftar pemilih, mengatur pemilihan calon, serta memastikan kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. KPU juga harus memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Fungsi kedua KPU adalah sebagai pengawas pemilu. KPU memiliki peran penting dalam memantau jalannya proses pemilihan. Mereka bertugas mengawasi segala aktivitas terkait dengan pemilihan umum, mulai dari kampanye politik, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. KPU berupaya mencegah dan menanggulangi pelanggaran yang mungkin terjadi selama pemilihan, termasuk pelanggaran administrasi, penyebaran berita bohong, atau manipulasi suara. Sebagai pengawas, KPU memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, KPU juga memiliki fungsi sebagai pengatur pemilu. Mereka bertugas mengeluarkan peraturan dan pedoman terkait pelaksanaan pemilihan umum. KPU menetapkan aturan mengenai partisipasi partai politik, dana kampanye, pemanfaatan media massa, serta prosedur penyelesaian sengketa pemilihan. Fungsi ini penting dalam menjaga kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan dalam pemilihan umum. KPU juga berperan dalam mengklarifikasi interpretasi undang-undang pemilihan dan memberikan panduan kepada pihak terkait.

Sebagai lembaga yang independen, KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemilu yang bebas dari intervensi politik dan pengaruh kekuatan tertentu. KPU harus menjaga netralitas, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Fungsi-fungsi tersebut menggarisbawahi peran KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan memperkuat sistem politik Indonesia

Sosialisasi politik merupakan proses penting dalam membentuk pemahaman dan partisipasi politik masyarakat. Melalui sosialisasi politik, informasi, nilai-nilai, dan norma-norma politik disampaikan kepada individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam esai ini, kita akan membahas pentingnya sosialisasi politik dan peranannya dalam membangun kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik. (dalam Komarudin Sahid, 2011:198)

sosialisasi politik merujuk pada proses yang membentuk nilai-nilai politik dalam individu. Ini melibatkan pembentukan sikap politik dan pola tingkah laku politik yang mengarahkan bagaimana setiap anggota masyarakat seharusnya berpartisipasi dalam sistem politik mereka. Teori sosialisasi politik Almond menekankan bahwa individu belajar nilai-nilai politik melalui interaksi dengan lingkungan politik mereka, termasuk keluarga, sekolah, teman sebaya, media massa, dan institusi politik

Partisipasi politik dapat melibatkan berbagai tindakan seperti memberikan hak pilih pada pemilihan umum, bergabung dalam partai politik, menghadiri pertemuan politik, mengikuti kampanye, menyuarakan pendapat dalam demonstrasi atau protes, berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik, atau berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam partisipasi politik, individu dapat berupaya mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik, memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok, atau berusaha memperbaiki kondisi sosial dan politik dalam masyarakat. Partisipasi politik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi, di mana partisipasi aktif dari warga negara dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas demokrasi itu sendiri (Damsar, 2012).

Sosialisasi politik berperan sebagai jembatan antara individu dan sistem politik. Proses ini dimulai sejak dini, baik melalui keluarga, pendidikan formal, maupun melalui interaksi sosial di lingkungan sekitar. Sosialisasi politik memainkan peran penting dalam membentuk identitas politik individu, sikap, dan nilai-nilai politik yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan politik.

### **Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Di Kota Pontianak**

Pelaksanaan peran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran dan fungsi sosialisasi Pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kota Pontianak dengan kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Memberikan Pendidikan Pemilih

Salah satu sosialisasi yang dilakukan agen sosialisasi yaitu lembaga penyelenggara pemilu adalah memberikan pendidikan pemilih, Sosialisasi oleh penyelenggara pemilu adalah dengan Proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu adalah bagian dari memeberikan pendidikan bagi pemilih, (Budiardjo, 2010:371),

Jadi berdasarkan hasil temuan dan pembahasan diatas mengenai pendidikan pemilih dapat peneliti simpulkan KPU dalam memberikan pendidikan pemilih, melakukan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan politik yang dilakukan KPU Kota Pontianak adalah melakukan kerja sama dengan berbagai kelompok sasaran yang ingin dicapai. Kelompok sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih meliputi masyarakat umum (publik), pemilih pemula, pemilih muda, komunitas, perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, keagamaan, kaum marjinal, penyandang disabilitas, warganet. Kegiatan yang dilakukan adalah KPU Goes To School KPU Goes To campus, KPU Goes To community, Kursus kepemiluan, relawan demokrasi. Selain sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dijabarkan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan metode tatap muka, ceramah serta kegiatan dilakukan ditempat terbuka, kegiatan dilakukan tempat terbuka ditujukan untuk masyarakat umum berupa perlombaan dan konser yang dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula ataupun pemilih muda yang potensi jumlah suaranya sangat besar.

#### 2. Memaksimalkan Proses Sosialisasi

Memaksimalkan atau mengoptimalkan adalah proses meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria atau harapan yang telah ditetapkan. Memaksimalkan juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Proses sosialisasi merupakan suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik setiap anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik dalam suatu Negara.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam memaksimalkan proses kegiatan sosialisasi melakukan berbagai kegiatan pelatihan, pelantikan, evaluasi, bimtek, dan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan sosialisasi politik untuk memkasimalkan proses sosialisasi politik. Jadi dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil temuan dan pembahasan

bahwa KPU dalam memaksimalkan proses sosialisasi untuk meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria atau harapan yang telah ditetapkan melakukan berbagai persiapan, pelatihan, penyusunan rencana kerja, perumusan target, kemudian hasil yang diperoleh barulah di evaluasi.

### 3. Melakukan survey atau Jejak Pendapat

Jejak pendapat adalah survey mengenai pendapat atau pandangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik sampel. Jejak pendapat biasanya dirancang untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan-pandangan suatu populasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada beberapa orang yang dianggap mewakili populasi dan kemudian menyimpulkan jawaban-jawabannya sebagai gambaran dari kelompok yang lebih luas (Eryanto, 2010). Eryanto juga menyebutkan bahwa jejak pendapat berkaitan dengan pemilihan pejabat publik sebagai sarana bagi kandidat untuk memperkenalkan dirinya kepublik sejak awal, atau kepada partai yang akan mengusung calon, selain itu mengukur secara akurat bagaimana persepsi publik terhadap politik.

Jadi berdasarkan hasil temuan dan deskripsi dapat peneliti simpulkan Komisi Pemilihan Umum dalam mengukur persepsi masyarakat melalui metode survey atau jejak pendapat, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat dari sampel yang representative dari populasi yang menjadi target sasaran.

### 4. Peningkatan Kinerja Pemilu

Terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut. Kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi (Moehariono, 2012).

Jadi dari hasil penelitian disimpulkan peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksana tugas dan wewenang sosialisasi politik, Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara sosialisasi dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik dengan memberikan pendidikan kepada pemilih khususnya pemilih pemula, memaksimalkan proses sosialisasi, melakukan survey atau jejak pendapat, dan meningkatkan kinerja pemilu.

## **Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula,**

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan Faktor- faktor yang mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik bagi pemilih pemula dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

### 1. Mekanisme Sosialisasi Politik

Pelaksanaan sosialisasi politik memerlukan adanya suatu mekanisme yang semestinya dijadikan sebagai patokan dalam melaksanakan sosialisasi politik. Menurut teori yang dikemukakan oleh Althoff dan Rush (2005), terdapat beberapa mekanisme sosialisasi politik yang berperan dalam membentuk sikap dan partisipasi politik individu. Yaitu: keluarga, pendidikan, teman sejawat, Media masa dan pengalaman pribadi. Mekanisme-mekanisme sosialisasi politik tersebut berinteraksi satu sama lain dan dapat berperan dalam membentuk sikap, pengetahuan, dan partisipasi politik individu. Dalam kombinasi dengan faktor-faktor lain seperti budaya, struktur sosial, dan pengalaman hidup individu, mekanisme sosialisasi politik ini membentuk pemahaman politik individu dan kontribusi mereka dalam kehidupan politik.

### 2. Pola sosialisasi Politik

Pola sosialisasi merujuk pada cara individu mempelajari dan berinteraksi dengan norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku dalam masyarakat. Ada beberapa pola sosialisasi yang umum dijumpai, dan Pola-pola sosialisasi politik ini saling berinteraksi dan dapat membentuk sikap politik, pengetahuan, dan keterlibatan politik seseorang. Penting untuk diingat bahwa pola sosialisasi politik dapat bervariasi antara individu dan tergantung pada konteks sosial, budaya, dan pengalaman hidup masing-masing individu. Ramlan Surabakti (2010:125) mengatakan pola sosialisasi adalah proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi diantara kepribadian individu dengan pengalam-pengalaman yang relevan. Oleh karena itu, untuk mempermudah hasil proses sosialisasi dibentuklah pola sosialisasi yang diilustrasikan.

### 3. Sosial Ekonomi

Menurut Basrowi (2010), sosial ekonomi merupakan istilah yang menggabungkan aspek-aspek sosial dan ekonomi dalam analisis suatu fenomena atau masalah. Konsep sosial ekonomi menurut Basrowi membantu kita memahami bahwa aspek-aspek sosial dan ekonomi saling berinteraksi dan memengaruhi kondisi dan dinamika masyarakat. Pendekatan sosial ekonomi ini melihat fenomena sosial secara komprehensif, dengan mempertimbangkan hubungan antara struktur sosial, ekonomi, dan konteks sosial dalam analisisnya.

### 4. Sistem Politik

Sistem politik menurut David Easton terdiri dari jumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh masyarakat.

## **SIMPULAN**

Secara keseluruhan, sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU untuk pemilih pemula di Kota Pontianak memiliki dampak yang positif. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang politik dan proses pemilihan, pemilih pemula dapat menjadi pemilih yang lebih informan, aktif, dan berperan penting dalam demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melaksanakan program Sosialisasi politik bagi pemilih pemula melalui Pendidikan politik, dan melakukan relasi di semua elemen seperti pemerintah, dinas pendidikan, dengan menjadi pemateri dalam sosialisasi tersebut. Program sosialisasi politik bagi pemilih pemula berperan penting dalam membantu pemahaman dan partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik.

Faktor anggaran atau alokasi dana yang tersedia dapat mempengaruhi kemampuan KPU untuk melakukan sosialisasi politik secara efektif. Jumlah dana yang tersedia dapat membatasi atau memperluas ruang lingkup kegiatan sosialisasi yang dapat dilakukan oleh KPU. Selain itu ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang bekerja di KPU juga dapat memengaruhi sosialisasi politik. Keahlian dan kemampuan tim sosialisasi KPU dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan persuasif akan berdampak pada efektivitas sosialisasi politik yang dilakukan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memiliki peran penting dalam sosialisasi politik.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu dan memberikan data yang berharga. Tanpa partisipasi mereka, penelitian ini tidak akan terwujud. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada tim penelitian yang telah bekerja keras untuk merancang dan melaksanakan studi ini. Kolaborasi dan dedikasi mereka dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data sangatlah berarti dalam menemukan hasil yang signifikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Althoff, Phillip dan Rush, Michael. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Basrowi dan Siti Juariyah. 2010. *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur*. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan. Vol 7 No 1 April 2010
- Budiarjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Damsar, P.D (2012). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Eryanto, Henry. 2010. *Kepemimpinan*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta
- Lukman Janji, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (Studi pada Pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar.” (Makassar, UIN Alaudin Makassar, 2013)
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sahit, Komarudin 2011. Memahami Sosiologi Politik, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Surbakti, Ramlan, 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia